

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dewasa ini. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidak mampuan masyarakat miskin. Kemiskinan saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Karena dengan adanya kemiskinan maka akan sangat mempengaruhi tujuan dan cita-cita nasional yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu.

Kemiskinan dipahami sebagai suatu persoalan yang bersifat kompleks, multi dimensi, dan struktural (Sudarwati, 2009: 22). Sementara itu, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini dipandang kurang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan sering kali tidak berkelanjutan, bahkan upaya tersebut tidak mencapai hasil seperti yang telah direncanakan sebelumnya, atau tidak tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin. Sehingga upaya penanggulangan tersebut dianggap sia-sia karena masalah kemiskinan pun tidak teratasi, kemudian masalah kemiskinan akan bertambah lagi. Untuk mengatasi

masalah tersebut maka pemerintah membuat program dimana program tersebut dengan pendekatan memberdayakan masyarakat miskin.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harafiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijaksanaan publik (*public policies*) dengan baik, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam paham bangsa Indonesia, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang. Selanjutnya berturut-turut akan dibahas tujuan pembangunan, konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks perkembangan paradigma pembangunan, pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewujudkannya. Bahasan ini akan ditutup dengan kajian beberapa kasus sebagai ilustrasi (<http://www.ginanjari.com>)

Program penanggulangan kemiskinan dengan model pemberdayaan merupakan program yang dapat menjadikan masyarakat mempunyai wawasan karena dengan model pemberdayaan seperti ini masyarakat miskin turut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan. Dengan begitu perubahan perilaku masyarakat miskin tersebut bisa mendorong mereka untuk mengurangi kemiskinan. Menurut (Sudarwati, 2009: 37) Begitu juga program dari pusat yang bersifat program

secara langsung yang bersifat jangka pendek. Penerapan program pusat baik berupa model pemberdayaan dan model secara langsung tentunya memiliki permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas.

Beragam program yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi selama ini. Bahkan kegiatan-kegiatan ini dibiayai secara spesifik oleh pemerintah masih jauh dari upaya penyelesaian masalah kemiskinan. Kegagalan berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut setidaknya-tidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Program lebih bersifat “top-down” sehingga kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat;
- b. Program yang dilaksanakan cenderung bersifat karikatif sehingga kurang mendorong kemandirian masyarakat, bahkan menimbulkan dampak ketergantungan masyarakat miskin kepada pihak lain;
- c. Program dilakukan secara parsial, tidak menyeluruh dan tidak terpadu, sehingga kurang memberikan dampak positif yang optimal;
- d. Kuatnya paradigma di masyarakat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan tugas pemerintah saja, sehingga partisipasi pihak lain (swasta dan masyarakat) terhadap program sangat rendah;
- e. Belum disentuhnya aspek kesadaran dalam diri masyarakat miskin bahwa mereka sendirilah sebenarnya kunci utama penyelesaian masalah kemiskinan (Suzetta, 2008:66).

Sebenarnya perdebatan antara pendekatan “top down” dan “bottom up” tidak perlu terjadi apabila sistem politik nasional dan terutama lokal mampu menciptakan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakatnya (Kuncoro, 2004:172).

Karena seringkali program dan kegiatan belum diiringi dengan upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga keberlanjutan dan kelestarian program menjadi rendah (skema proyek belum bisa berubah menjadi skema program).

Sesudah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya yaitu sandang, pangan, serta kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk hidup yang lebih tinggi (<http://www.ichwanmuis.com>). Khususnya bagi rakyat miskin, pemenuhan kebutuhan rumah mereka sangat dibutuhkan karena rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Namun masih banyak masyarakat miskin menempati rumah yang tidak layak huni hal ini disebabkan masyarakat miskin tersebut tidak mempunyai biaya untuk memperbaiki rumah mereka karena penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sini Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan dan permukiman, sebab Pemda adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah kebutuhan hunian masyarakatnya. Meskipun pembangunan perumahan dan permukiman yang layak sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum dapat tercapai secara menyeluruh.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni untuk masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Jombang mencoba merancang suatu model sederhana yaitu rencana program penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Rancangan umum program penanggulangan kemiskinan didesain sebagai suatu rencana program untuk menangani permasalahan umum yang mendesak pemecahannya, dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh keluarga atau

kelompok masyarakat miskin dan kemampuan potensi pemberdaya yang dimiliki oleh *stakeholders* seperti organisasi pemerintah, unsur perguruan tinggi dan masyarakat itu sendiri.

Gerakan Serentak (Gertak) adalah kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu. Program peningkatan sarana penunjang kesehatan bagi rumah tangga miskin dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang berdasarkan hasil survey 14 (empat belas) indikator kemiskinan terutama pada Jenis lantai rumah berupa tanah, bambu atau kayu murahan. Jenis dinding rumah berupa bambu, rumbia, kayu kualitas rendah dan tembok tanpa plester serta tidak punya fasilitas tempat buang air besar (jamban) atau berbagi dengan rumah tangga lain (Petunjuk Teknis Pelaksanaan GERTAK Tahun 2010).

Dalam rangka percepatan pengentasan rumah tangga miskin terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar berupa papan (hunian) serta pencapaian tujuan pembangunan millenium (*Millenium Development Goals*) dan untuk meningkatkan jangkauan penerima manfaat program, maka pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan meluncurkan program peningkatan sarana penunjang kesehatan bagi rumah tangga miskin dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Jombang Tahun 2010 (Petunjuk Teknis Pelaksanaan GERTAK Tahun 2010).

Program dititikberatkan pada rumah tangga miskin yang dari sisi sarana dasar belum memenuhi standart kualitas kesehatan. Fokus utama program adalah rehabilitasi dan peningkatan sarana dasar perumahan bagi rumah tangga miskin.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran *stakeholder* serta pemerintah desa dilaksanakan untuk mendorong kemandirian dan sinergi berbagai pihak dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan sebagai upaya keberlanjutan program. Hal ini juga akan mendorong penyelarasan dengan program lain, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat dan meningkatkan prospek pencapaian tujuan bersama dalam meningkatkan pelayanan, khususnya kepada masyarakat miskin, pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs) dan pengurangan kemiskinan.

Mengingat kondisi rumah keluarga miskin di Kabupaten Jombang khususnya di Kecamatan Ngoro secara umum belum memenuhi syarat, baik persyaratan teknis maupun syarat kesehatan. Masih banyak rumah yang lantainya belum dipleset, tidak ada jendela maupun ventilasi, dapur jadi satu dengan kamar tidur dan masih banyak lagi yang perlu dibenahi, sehingga layak untuk di huni. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Anggaran Pendapatan Belanja daerah Tahun Anggaran 2010 mengalokasikan dana sebesar Rp. 570.000.000,00 untuk merehabilitasi rumah keluarga miskin sebanyak 190 unit rumah yang terdiri 63 desa tersebar di 21 Kecamatan se-Kabupaten Jombang (Petunjuk Teknis Pelaksanaan GERTAK Tahun 2010).

Dalam melaksanakan program tersebut perlu disusun suatu petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi untuk keluarga miskin tahun 2010. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menghasilkan, mengefektifkan dan mengoptimalkan proses dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi, serta mengantisipasi berbagai permasalahan di

lapangan. Untuk memastikan sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran serta bagaimana perkembangan kondisi kemiskinan dari waktu ke waktu perlu dikembangkan sistem pemantauan dan evaluasi. Sistem pemantauan ditujukan untuk memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan serta terhadap perkembangan kondisi kemiskinan yang ada. Sedang sistem evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak strategi dan kebijakan yang ada telah berhasil mengatasi masalah kemiskinan serta untuk menyempurnakan upaya atau kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu perencanaan, penyusunan kegiatan dan pengambilan keputusan di masa depan. Secara lebih spesifik tujuan dari evaluasi meliputi:

- a. Mengetahui pelaksanaan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan antara lain dari aspek; keberhasilan dan kegagalan, keunggulan, dan kelemahan, penyimpangan dan penyebabnya.
- b. Mengetahui pencapaian tujuan yang hendak dicapai.
- c. Mengetahui manfaat dan dampaknya terhadap kelompok sasaran.
- d. Membuat tindakan korektif secara dini.
- e. Mengoptimalkan upaya yang dilakukan.
- f. Menarik bahan pelajaran untuk perencanaan dan pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan di masa mendatang secara lebih baik. (Sudarwati, 2009:89).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilandasi oleh kejujuran, motivasi dan tanggung jawab yang kuat dari pelaku. Selain itu, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Obyektif dan profesional, monitoring dan evaluasi berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan menjadi masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. Transparan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah;

- c. Partisipatif, dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku penanggulangan kemiskinan, termasuk masyarakat miskin itu sendiri;
- d. Akuntabel, pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal;
- e. Tepat waktu, pelaksanaan monev harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan;
- f. Berkesinambungan, pelaksanaan monev dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan;
- g. Berbasis indikator kinerja, monev dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak. (Sudarwati, 2009:89).

Dalam konteks pelaksanaan program Gerakan Serentak (GERTAK) Rehab Rumah Tidak Layak Huni, evaluasi kebijakan sangatlah perlu untuk mengukur program itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Mengingat besarnya dana yang diserap di program ini. Sehingga kajian ini dapat menjadi sebuah rekomendasi apakah program ini bisa dilanjutkan atautkah disudahi jika terbukti *outcome* yang didapat tidak ada laporan pasti bagaimana program yang dilaksanakan dapat berjalan.

Berdasarkan pemikiran di atas sangat menarik apabila pelaksanaan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (GERTAK) berikut permasalahannya untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Gerakan Serentak (Gertak) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Ngoro Di Kabupaten Jombang”**. Alasan peneliti mengambil tema tersebut karena ada permasalahan yang cukup menarik untuk dikaji lebih jauh. Dalam implementasi program GERTAK tersebut, bukan hanya keberhasilan secara teknis saja yang terjadi

akan tetapi permasalahan pada dinamika implementasi hingga pencapaian tujuan utama yaitu kesejahteraan dari target kelompok juga menjadi fokus dalam penelitian ini.

A. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah profil program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Bagaimanakah perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat penerima program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
3. Apakah dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

B. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis profil program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat penerima program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak

Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

C. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Aspek Akademis
 - a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi administrasi publik, terutama tentang kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan.
 - b. Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain dalam mengembangkan studi lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Aspek Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam membuat program kebijakan khususnya kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi cara sosialisasi tentang program pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang merupakan rangkaian antar bab yang satu dengan yang lainnya. Adapun penulisan sistematika ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang mengenai Gerakan Serentak (Gertak) adalah kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu. Program peningkatan sarana penunjang kesehatan bagi rumah tangga miskin dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang berdasarkan hasil survey 14 (empat belas) indikator kemiskinan terutama pada Jenis lantai rumah berupa tanah, bambu atau kayu murahan. Jenis dinding rumah berupa bambu, rumbia, kayu kualitas rendah dan tembok tanpa plester serta tidak punya fasilitas tempat buang air besar (jamban) atau berbagi dengan rumah tangga lain. Dalam melaksanakan program tersebut perlu disusun suatu petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi untuk keluarga miskin tahun 2010. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menghasilkan, mengefektifkan dan mengoptimalkan proses dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi, serta mengantisipasi berbagai permasalahan di lapangan. Untuk memastikan sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran serta bagaimana perkembangan kondisi kemiskinan dari waktu ke waktu perlu dikembangkan sistem pemantauan dan evaluasi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimanakah profil program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Bagaimanakah perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat penerima program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, dan apakah dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis profil program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, mendeskripsikan dan menganalisis perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat penerima program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini yaitu aspek akademis dan aspek praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan terori-teori dijadikan acuan sebagai dasar identifikasi dan analisis. Teori-teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini berkenaan dengan kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, kemiskinan dan Program GERTAK.

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berisikan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian akan mengkaji mengenai Profil program GERTAK, perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat serta dampak dari kebijakan Program GERTAK. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, sedangkan situs dalam penelitian ini di Dinas PU Cipta Karya dan LPMD. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di Dinas PU Cipta Karya, aparaturnya, LPMD, serta masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain, interview/wawancara, observasi, studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif,

adapun aktivitas dalam analisis data meliputi, reduksi data; penyajian data; serta menarik kesimpulan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini berisi tentang data hasil penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari Gambaran umum Kecamatan Ngoro dan Gambaran umum Dinas PU Cipta Karya, penyajian data dan fokus yang meliputi profil GERTAK di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang; perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pelaksanaan GERTAK meliputi tiga aspek yaitu perubahan dan dampak di bidang fisik/lingkungan.

Perubahan pada bidang aspek lingkungan ini yaitu terciptanya perumahan sehat dan layak huni yang memenuhi standar rumah sehat serta menjadikan bangunan di lingkungan sekitar menjadi rapi; perubahan pada bidang ekonomi adanya peningkatan pendapatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berkaitan dengan peningkatan kualitas ekonomi, maka rumah bukan lagi sekedar *home-life*, tetapi tempat produksi dan berusaha; dan perubahan pada bidang sosial meningkatnya kemampuan sumber daya manusia, misalnya kesempatan mendapatkan ketrampilan sehingga lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Dampak pada bidang lingkungan dengan lingkungan rumah yang sehat maka mengurangi angka kesakitan masyarakat miskin penerima bantuan; dampak pada bidang ekonomi terciptanya kesejahteraan masyarakat; dampak pada bidang sosial Terwujudnya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya pembangunan yang berkelanjutan.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dalam pelaksanaan GERTAK di Kecamatan Ngoro yang telah berdampak positif terhadap masyarakat setempat khususnya masyarakat miskin. Karena program GERTAK merupakan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Program penanggulangan kemiskinan dengan model pemberdayaan merupakan program yang dapat menjadikan masyarakat miskin mempunyai wawasan karena dengan model pemberdayaan seperti ini masyarakat miskin turut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan serta masyarakat miskin tersebut bisa mendapatkan informasi mengenai pembangunan. Dengan begitu perubahan perilaku masyarakat miskin tersebut bisa membantu mereka untuk mengurangi kemiskinan.